RENCANA KERJA TAHUN 2027

BAPPEDA LITBANG
KAB. NUNUKAN

SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dimaksudkan sebagai:
   a. dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat Arah Kebijakan urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahun 2027; dan
   b. bahan acuan seluruh komponen penyelenggara pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah oleh masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.
(2) Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
   a. rencana stategis Perangkat Daerah; dan
   b. rencana kerja Pemerintah Daerah.
(3) Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan secara elektronik pada sistem informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN;
   b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
   c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
   d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
   e. BAB V : PENUTUP.

(2) Uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RENJA

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja Pemerintah Daerah berkenan; dan/atau
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:
   a. rancangan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
   b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

(4) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI NUNUKAN,

ttd

IRWAN SABRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 13 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RADEN IWAN KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan idayah-Nya jualah kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Renja PD disusun dengan memperhatikan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini memuat informasi perencanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 tentang Pembangunan Kabupaten Nunukan khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja PD ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun merupakan bahan masukan yang diperlukan guna penyempurnaan pembuatan penyusunan Renja PD di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini tidak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Renja PD Tahun 2027.

Demikian Renja PD Tahun 2027 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2027.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM..... 5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 7

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..... 8

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... 9

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 15

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 17

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 17

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 23

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 24

3.2. TUJUAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 26

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN..... 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……..... 32

BABV PENUTUP..... 37

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi, informasi dan komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni pemerintah masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan *Good Governance* Sesuai tuntutan reformasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan

dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (satu) tahun ke depan berpedoman pada Rencana Strategis 2025-2029.

Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah daerah terendah dan terkecil.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat daerah. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada Rancangan Awal Renja PD;
2. Rumusan program/kegiatan dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
3. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Dengan demikian Renja PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan Tahun 2027 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2021 – 2026 yaitu **"*Mewujudkan Aparatur Nunukan Yang Aman, Maju, Adil Dan Sejahtera*** Tahun Anggaran 2026 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan 2025-2029, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2027 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

KETERKAITAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

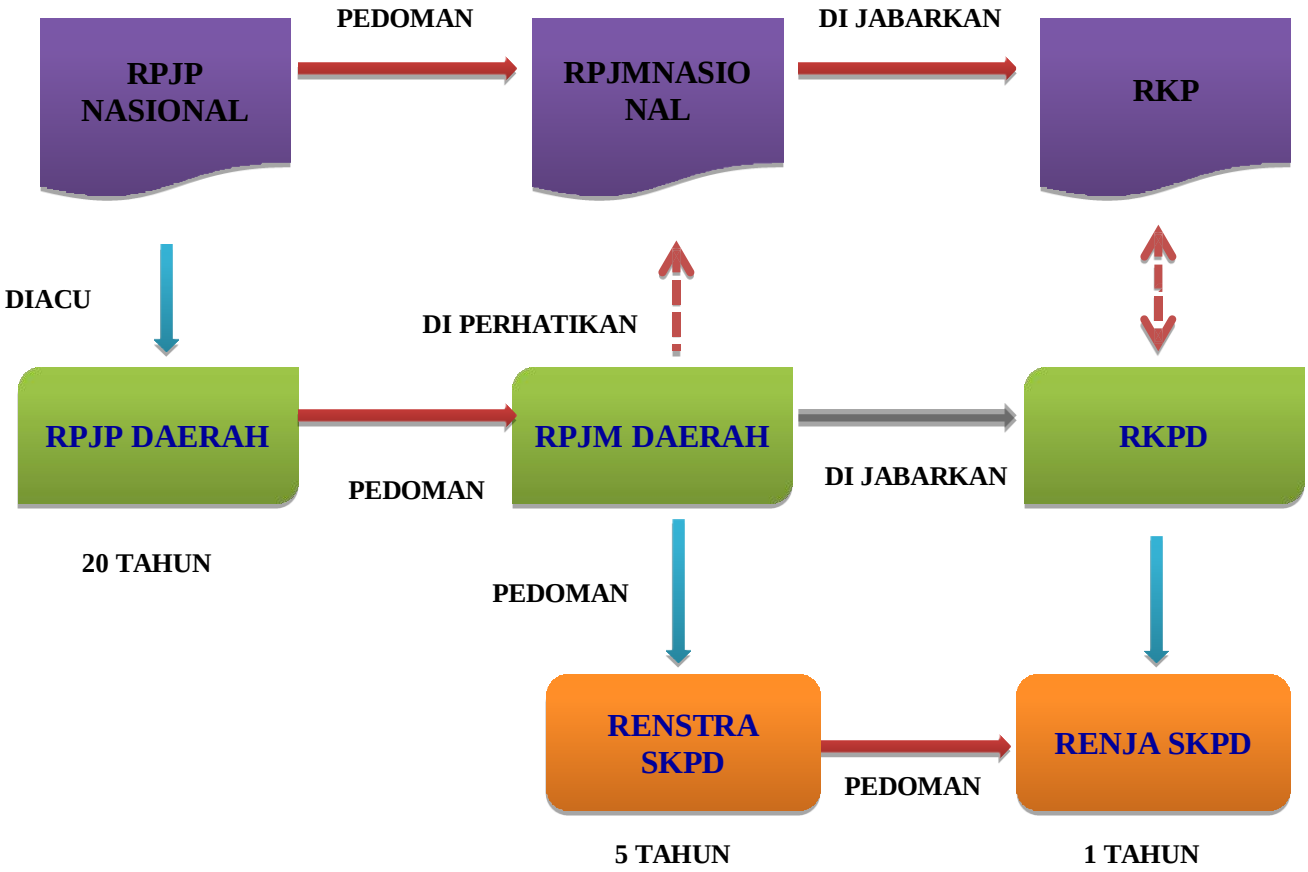

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siste perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nonor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah KLabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pebangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Renja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan Bappeda Litbang untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi : Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Nunukan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan;

Adapun tujuan Penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu – isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rekapitulasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun–tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) tahun berjalan yang sudah disahkan. Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD belum disusun maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra PD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra PD.

Capaian kinerja tahun 2026 serta perkiraan pencapaian kinerja tahun 2027 belum dapat dikaitkan dengan target pencapaian kinerja tahunan dalam Renstra Bappeda Litbang Periode 2025-2029, dikarenakan realisasi tahun 2026 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Litbang tahun 2026 dan Capaian Renstra Periode 2025-2029 akan disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

TABEL. 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA PD) Sampai Dengan Tahun Berjalan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2030 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PDTahun Lalu (n-2)			Target Program / kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun/n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan Tahun 2026				Catatan
										Target tahun 2025	Realisasi renja tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)		12
4	3				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN														
4	3	1			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan														
4	3	1	1		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	**100**	**%**		100%	100%	100	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**%**	

4	3	1	1	2	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	18	Dok		3	3	100	3	Dok	**6**	Dok	**33,33**	%	
4	3	1	1	8	2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	18	RPD		3	3	100	3	RPD	**6**	RPD	**33,33**	%	
4	3	1	1	10	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian,evaluasi dan pelaporan peelaksanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	12	Dok		3	3	100	2	Dok	**5**	Dok	**41,66**	%	
4	**3**	**1**	**17**		**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD**	**100**	**%**		100%	100%	100	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**%**	
4	3	1	17	58	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	%		100%	100%	100	100	%	**100**	%	**100,00**	%	

4	3	1	17	58	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang perekonomian dan SDA	100	%		100%	100%	100	100	%	**100**	%	**100,00**	%	
4	3	1	17	58	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	%		100%	100%	100	100	%	**100**	%	**100,00**	%	
4	**3**	**1**	**2**		**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**		**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah**	**100**	**%**		100%	100%	100	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**%**	
4	3	1	2	22	1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	51	Dok		13	13	100	9	Dok	**22**	Dok	**43,13**	%	
4	3	1	2	24	2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah	72	Laporan		13	13	100	13	Laporan	**26**	Laporan	**36,11**	%	

							yang tersusun tepat waktu												
4	3	1	2	26	3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian	72	Bulan		12	12	100	12	Bulan	**24**	Bulan	**33,33**	%	
4	3	1	5	1	1	Admistrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran	72	Bulan		12	12	100	12	Bulan	**24**	Bulan	**33,33**	%	
4	3	1	3		5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah penambahan barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	51	Unit		10	10	100	10	Unit	**20**	Unit	**39,21**	%	
4	3	1	3		1	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	72	Bulan		12	12	100	12	Bulan	**24**	Bulan	**33,33**	%	
4	3	1	3			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan pemeliharaan ruitn/berkala barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	72	Bulan		12	12	100	12	Bulan	**12**	Bulan	**33,33**	%	
4	**3**	**1**	**6**		**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**		**Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan**	**55,4**	**%**		-	-	-	**55**	**%**	**0**	**%**	**0**	**%**	
4	3	1	6	1	1	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	5	Laporan		1	1	100	1	Laporan	**2**	Laporan	**40**	~~%~~	

4	3	1	15	2	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	4	Dok		0	0	0	1	Dok	**1**	Dok	**25**	%	
4	3	1	15	8	2	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	Jumlah inovasi yang diinisiasi oleh perangkat daerah	4	Dok		5	5	100	1	Dok	**6**	Dok	**100**	%	

Dari Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan terhadap Renstra Perangkat Daerah di atas dapat diketahui bahwa n tahun Renja adalah tahun 2027 maka tahun n-1 adalah tahun 2026 dan realisasi target program dan kegiatan pada tabel tersebut diatas adalah hasil realisasi triwulan pertama. Dikarenakan periode Renstra PD untuk tahun ini adalah periode terakhir dari tahun pelaksanaan Renstra 2021-2026, maka untuk tahun n-2 (2024) dan n-3 adalah tahun 2023 dimana merupakan periode tahun kedua dan ketiga periode Renstra.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nunukan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan

No	Sasaran	Indikator	IKK	Target Renstra		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	-	100	100	-	-	100	100	
		Persentase Keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	-	100	100	-	-	100	100	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Bappeda Litbang kab. Nunukan	-	78	79	-	-	78	79	
3	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	-	55	55	-	-	55	55	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selaku penyusun, pengendali dan pelaksana rencana pembangunan daerah perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan mampu berfikir jauh ke depan, sehingga dapat menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah.

Permasalahan strategis yang terjadi dan sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang yaitu mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan terutama dalam memenuhi kebutuhan data informasi yang menjadi landasan bagi perumusan kebijakan serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Litbang dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan guna menghadapi tantangan dan menangkap peluang dalam capaiannya meningkatkan pelayanan perangkat daerah adalah terkait :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal Perangkat Daerah
2. Meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatkan kinerja koordinasi dan pelaksanaann hasil perencanaan
4. Penguatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah serta kapasitas sumber daya aparatur Perangkat Daerah

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, memberikan penjelasan alasan proses tersebut dilakukan, melakukan pencatatan penting atas temuan-temuan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD tersebut di atas disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

TABEL 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2027

Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**NUNUKAN**	**Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan**	**100%**	**3.237.674.220,40**	**Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**	**NUNUKAN**	**Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada**	**100%**	**1.895.878.911,40**	**sesuai dokumen renstra 2025-2029**
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	NUNUKAN	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	3 Dokumen	190.681.270,00	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	NUNUKAN	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	3 Dokumen	924.001.611,00	sesuai dokumen renstra 2025-2029
2	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	NUNUKAN	Jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	3 RPD	574.882.352,40	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	NUNUKAN	Jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	3 RPD	320.776.400,00	

2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang perekonomian dan SDA	100%	537.801.689,69	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (suber daya alam)	NUNUKAN	Persentase Keselarasan Program Renja Terhadap Program Renstra Pada Tahun Berkenaan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan SDA	100%	438.280.410,00	
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	537.801.689,00	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	NUNUKAN	Persentase Keselarasan Program Renja Terhadap Program Renstra Pada Tahun Berkenaan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	445.985.055,00	
III	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**NUNUKAN**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah**	100%	**11.218.392.979,64**	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**	**NUNUKAN**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah**	100%	**4.805.286.241,00**	sesuai dokumen renstra 2025-2029
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NUNUKAN	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	13 Dokumen	1.296.436.403,00	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	9 Dokumen	854.117.260,00	sesuai dokumen renstra 2025-2029

1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NUNUKAN	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	13 Laporan	7.771.790.989,50	Administrasi keuangan perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	13 Laporan	7.174.664.678,44	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	219.000.000,00	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	31.914.000,00	
3	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran	12 Bulan	872.504.421,00	Admistrasi umum perangkat daerah	-	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran	12 Bulan	677.955.935,00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NUNUKAN	Jumlah penambahan barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12 Unit	150.000.000,00	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	NUNUKAN	Jumlah penambahan barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12 Unit	9.434.890,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	604.556.480,00	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	585.600.480,00	sesuai dokumen renstra 2025-2029
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan pemeliharaan ruitn/berkala barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12 Bulan	304.10 4.686,14	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan pemeliharaan ruitn/berkala barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12 Bulan	241.451.970,00	

IV	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**NUNUKAN**	**Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah**	**32,00%**	**130.299.188,41**	**Program penelitian dan pengembangan daerah**	**NUNUKAN**	**Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah**	**32,00%**	**384.444.485,00**	sesuai dokumen renstra 2025-2029
1	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	NUNUKAN	Jumlah hasil kelitbangna bidan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 Laporan	41.151.088,00	Penelitian dan pengembangna bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	-	Jumlah hasil kelitbangna bidan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 Laporan	-	sesuai dokumen renstra 2025-2029
2	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	NUNUKAN	Jumlah hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	105.299.188,41	Penelitian dan pengembangna bidang ekonomi dan pembangunan	-	Jumlah hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	-	
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	NUNUKAN	Jumlah inovasi yang diinisiasi oleh perangkat daerah	5 Dokumen	25.000.000	Pengembangan inovasi dan teknologi	-	Jumlah inovasi yang diinisiasi oleh perangkat daerah	5 Dokumen	384.444.485,00	
JUMLAH					**8.754.096.241**					**8.754.096.241**	

2.5. PENELAAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota, dapat disajikan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan sesuai tabel 2.4 sebagai berikut :

TABEL 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	NIHIL				
1					
II					
1					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daeerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran atau karena tugas pokok dan fungsi. Teknis perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluru sumber daya (Pemerintah dan Swasta) untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keadilan. Dengan melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 – 2024 adalah terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut adala melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan nasional yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan idup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Mengacu pada tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2020 – 2024 adala mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, sebagai ukuran

tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, pembangunan nasional dalam 5 (lima) tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020 – 2024 adalah : Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, sebagai ukuran tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, pembangunan nasional dalam 5 (Lima) tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia erkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan berencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabiitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan Publik

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Forum Konsultasi Publik menggungkapkan " Penguatan Sektor Strategis Pasca Covid-19 untuk mencapai Indonesia Maju, Unggul, Tangguh dan Resilien" akan menjadi tema utama Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, dalam hal ini selaras dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024 poin ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Tema ini memiliki korelasi manakala dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Nunukan sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah.

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (Ranwal) , maka disusunlah Renja Bappeda Kabupaten Nunukan Tahun 2027. Salah satu yang menjadi fokus Bappeda tahun 2027 berdasarkan Sasaran Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan adalah *mewujudkan tersedianya tersedianya sumber daya manusia perencana yang berkualitas.*

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Nunukan. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan merupakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, sehingga merupakan arah yang akan dituju dalam terselenggaranya organisasi. Adapun tujuan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan adalah : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dan penerapan inovasi didaerah.

Pernyataan diatas dimaksudkan untuk menjadikan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam menghasilkan suatu perencanaan Kabupaten yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Untuk mendukung perwujudan tujuan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, maka sasaran yang dijalankan adalah (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (2) Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Bappeda Litbang Kab. Nunukan (3) Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi Daerah.

Pernyataan sasaran ini merupakan komitmen Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang baik dimana salah satu prasyarat dalam mewujudkan perencanaan yang baik.

3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Penelian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja

merupakan ukuran tolol ukur keberhasilan organisasai.

Kelompok indokator kinerja yang digunakan adala indikator kinerja outcome dari sasaran strategis. Indikator outcome adala indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu output. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daera Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029.

Indikator kinerja output adala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM dengan satuan orang.

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2027 kemudian prakiraan maju Tahun 2028 berdasarkan pelaksanaan Renstra badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 dapat digambarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. NUNUKAN

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU 2028	
				TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF
								NASIONAL	PROVINSI	DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			**13.212.642.174,84**							**16.799.691.937,00**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**13.212.642.174,84**							**16.799.691.937,00**
	5.01	**PERENCANAAN**			**12.864.197.689,84**							**16.449.691.937,00**
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**9.575.139.213,44**	**Bappeda Litbang Kab. Nunukan**	**APBD Kab. Nunukan**	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**100 %**	**8.940.752.119,00**
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penggangaran, dan evaluasi yang disusun		854.117.260,00	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)					854.119.760,00
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		7.174.664.678,44	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)					6.698.864.914,00
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian		31.914.000,00	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)					27.674.000,00
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa aministrasi umum perkantoran		677.955.935,00	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)					634.561.625,00

	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan Barang Milik Daerah (BMD) Kelompok Aset Tetap		9.434.890,00	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)					9.434.890,00
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		585.600.480,00	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)					585.132.480,00
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala Barang Milik DaeRah (BMD) Kelompak Aset Tetap		241.451.970,00	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)					130.964.450,00
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**100%**	**1.895.878.911,40**	**Bappeda Litbang Kab. Nunukan**	**APBD Kab. Nunukan**	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		**2.075.161.460,00**
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada	3 dokumen	924.001.611,40	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)				3 dokumen	877.287.760,00
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 RPD	651.100.900,00	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)				3 RPD	859.717.800,00
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) yg berbasis elektronik yg data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	2 dokumen	320.776.400,00	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)				2 dokumen	338.155.900,00
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**1.393.179.565,00**	**Bappeda Litbang Kab. Nunukan**	**APBD Kab. Nunukan**	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		**5.433.778.358,00**
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persentase	445.985.055,00	**Bappeda Litbang Kab. Nunukan**	**APBD Kab. Nunukan**	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persentase	450.000.000,00
			2.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persentase	508.914.100,00	**Bappeda Litbang Kab. Nunukan**	**APBD Kab. Nunukan**	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persentase	512.184.840,00

			3.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persentase	438.280.410,00	**Bappeda Litbang Kab. Nunukan**	**APBD Kab. Nunukan**	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persentase	4.471.593.518,00
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan Dokumen RENSTRA terhadap RPJMD dan Dokumen Renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persentase	445.985.055,00	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)				100 Persentase	450.000.000,00
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan Dokumen RENSTRA terhadap RPJMD dan Dokumen Renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia	100 Persentase	508.914.100,00	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)				100 Persentase	512.184.840,00
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan Dokumen RENSTRA terhadap RPJMD dan Dokumen Renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persentase	438.280.410,00	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)				100 Persentase	4.471.593.518,00
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**348.444.485,00**							**350.000.000,00**
4.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1.Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**	**10 Persentase**	**348.444.485,00**	**Bappeda Litbang Kab. Nunukan**	**APBD Kab. Nunukan**	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Optimalisasi Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**10 Persentase**	**350.000.000,00**
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah	1 dokumen	348.444.485,00	Bappeda Litbang Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 dokumen	350.000.000,00
	J U M L A H				**13.212.642.174,84**							**16.799.691.937,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Taun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Bappeda Litbang yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerinta Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan . Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daera menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Bappeda Litbang Kabupaten Tahun 2027 terdapat 4 (empat) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan,maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2027 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Rencana kerja dan Pendanaan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana program dan kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Bappeda Litbang 2025 - 2029.

Rencana program dan kegiatan prioritas Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan tahun 2025 sesuai tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(18)
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**13.212.642.174,84**	**Kab. Nunukan**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**13.212.642.174,84**		
	5.01	**PERENCANAAN**				**12.864.197.689,84**		
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9.575.139.213,44**		**Sekretariat**
		Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD				***9.575.139.213,44***		
			1.Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan	100 %	100 %	9.575.139.213,44		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				854.117.260,00		**Sekretariat**
		Jumlah dokumen perencanaan, penggangaran, dan evaluasi yang disusun				854.117.260,00		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	22.075.970,00		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	24.269.980,00		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	807.771.310,00		
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22.075.970,00		**Sekretariat**
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	22.075.970,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24.269.980,00		**Sekretariat**

		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	24.269.980,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				807.771.310,00		**Sekretariat**
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	807.771.310,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.174.664.678,44		**Sekretariat**
		Jumlah laporan pertanggungjawaban bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu				7.174.664.678,44		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	7.174.664.678,44		
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.174.664.678,44		**Sekretariat**
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7.174.664.678,44	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				31.914.000,00		**Sekretariat**
		Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian				31.914.000,00		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	20 Paket	0,00		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	57 Orang	31.914.000,00		
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		**Sekretariat**
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	57 Paket	0,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				31.914.000,00		**Sekretariat**
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	2 Orang	31.914.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	2 Orang	31.914.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				677.955.935,00		**Sekretariat**
		jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa aministrasi umum perkantoran				677.955.935,00		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	250.549.000,00		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	8 Paket	126.545.005,00		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	27.065.130,00		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	200.046.800,00		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	2 Paket	73.750.000,00		
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor				200.046.800,00		**Sekretariat**
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	200.046.800,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				73.750.000,00		**Sekretariat**
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	73.750.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				126.545.005,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	8 Paket	126.545.005,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.065.130,00		**Sekretariat**
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	27.065.130,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.549.000,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	250.549.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.434.890,00		
		Jumlah penambahan Barang Milik Daerah (BMD) Kelompok Aset Tetap				9.434.890,00		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	9.434.890,00		
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.434.890,00		**Sekretariat**
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	2 Unit	9.434.890,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				585.600.480,00		
		jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan				585.600.480,00		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	375.600.480,00		
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				210.000.000,00		**Sekretariat**
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				375.600.480,00		**Sekretariat**
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	375.600.480,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				241.451.970,00		
		jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala Barang Milik DaeRah (BMD) Kelompak Aset Tetap				241.451.970,00		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	100.000.000,00		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	10 Unit	106.691.970,00		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	34.760.000,00		

	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				106.691.970,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	10 Unit	106.691.970,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				34.760.000,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	34.760.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Nunukan Selatan || Kelurahan Nunukan Selatan || 0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				**1.895.878.911,40**		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				***1.895.878.911,40***		
			1.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 Persentase	100 Persentase	1.895.878.911,40		
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				924.001.611,40		
		Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada				924.001.611,40		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	22 Berita Acara	22 Berita Acara	55.069.600,00		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	42.090.300,00		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	103.938.540,00		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	338.455.859,45		

			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	420 Usulan	420 Usulan	384.447.311,95		
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik				42.090.300,00		
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	42.090.300,00	Provinsi Kalimantan Utara || Kab. Nunukan || Kecamatan Nunukan Selatan || Kelurahan Mansapa || 0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				55.069.600,00		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	22 Berita Acara	22 Berita Acara	55.069.600,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				103.938.540,00		
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	103.938.540,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				384.447.311,95		
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	420 Usulan	420 Usulan	384.447.311,95	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				338.455.859,45		
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	338.455.859,45	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				651.100.900,00		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				651.100.900,00		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	598.121.550,00		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	52.979.350,00		
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				52.979.350,00		
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	52.979.350,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				598.121.550,00		
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	598.121.550,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				320.776.400,00		
		jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) yg berbasis elektronik yg data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD				320.776.400,00		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	-	320.776.400,00		
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				320.776.400,00		
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	50 Orang	320.776.400,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**1.393.179.565,00**		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan				***445.985.055,00***		
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persentase	100 Persentase	445.985.055,00		
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				445.985.055,00		
		Persentase keselarasan Dokumen RENSTRA terhadap RPJMD dan Dokumen Renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				445.985.055,00		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	59.587.505,00		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	37.999.665,00		

			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	42.992.500,00		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	4 Laporan	35.362.635,00		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	93.989.000,00		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	56.994.000,00		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	77.068.000,00		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	4 Laporan	41.991.750,00		
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				59.587.505,00		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	59.587.505,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				42.992.500,00		
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	42.992.500,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				93.989.000,00		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	93.989.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				77.068.000,00		

		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	77.068.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				37.999.665,00		
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	37.999.665,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				35.362.635,00		
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	4 Laporan	35.362.635,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				56.994.000,00		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	56.994.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				41.991.750,00		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	5 Laporan	41.991.750,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				***508.914.100,00***		
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persentase	100 Persentase	508.914.100,00		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				508.914.100,00		

		Persentase keselarasan Dokumen RENSTRA terhadap RPJMD dan Dokumen Renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia				508.914.100,00		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	119.553.500,00		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	51.549.300,00		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	5 Laporan	45.017.500,00		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	31 Laporan	31 Laporan	55.837.800,00		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	5 Laporan	108.564.000,00		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	5 Laporan	4.420.000,00		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	31 Laporan	31 Laporan	24.762.000,00		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	31 Laporan	31 Laporan	99.210.000,00		
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				51.549.300,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	51.549.300,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	31 Laporan	27 Laporan	55.837.800,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				99.210.000,00		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	31 Laporan	27 Laporan	99.210.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				24.762.000,00		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	31 Laporan	27 Laporan	24.762.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				119.553.500,00		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	2 Dokumen	119.553.500,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				45.017.500,00		
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	7 Laporan	45.017.500,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				108.564.000,00		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	7 Laporan	108.564.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4.420.000,00		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	7 Laporan	4.420.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	7 Laporan	4.420.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA				***438.280.410,00***		
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persentase	100 Persentase	438.280.410,00		
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				438.280.410,00		
		Persentase keselarasan Dokumen RENSTRA terhadap RPJMD dan Dokumen Renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				438.280.410,00		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	41.913.000,00		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	43.690.000,00		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	2 Laporan	42.525.000,00		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	2 Laporan	59.603.000,00		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	36.110.000,00		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	5 Laporan	86.846.000,00		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	75.447.500,00		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan	52.145.910,00		

	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				41.913.000,00		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	41.913.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				42.525.000,00		
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	2 Laporan	42.525.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				36.110.000,00		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	36.110.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				75.447.500,00		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	75.447.500,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				43.690.000,00		
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	43.690.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				59.603.000,00		
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	2 Laporan	59.603.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				86.846.000,00		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	6 Laporan	86.846.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				52.145.910,00		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan	52.145.910,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**348.444.485,00**		
4.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**348.444.485,00**		
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan				***348.444.485,00***		
			1.Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	10 Persentase	10 Persentase	348.444.485,00		
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				348.444.485,00		
		Jumlah Inovasi yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah				348.444.485,00		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	249.000.485,00		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	99.444.000,00		
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				249.000.485,00		
		Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	249.000.485,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				99.444.000,00		
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	99.444.000,00	Kab. Nunukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB V
P E N U TU P

Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2027 ini nantinya merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah jangka maenengah. Rencana kerja Bappeda Kabupaten Nunukan tahun 2027 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Nunukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2027.

Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanaan, Bappeda Kabupaten Nunukan sebagai leading sektor yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplemantasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah aturan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah adanya masukan, informasi serta saran dan data-data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu kepada Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini diucapkan terima kasih.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2027 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami akan terus berusaha untuk kesempurnaan daripada dokumen Renja ini dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil gunanya.

Nunukan, Juni 2026

KEPALA,

PEMERINTAH KABUPATEN BAPPEDA LITBANG NUNUKAN

Drs. RADEN IWAN KURNIAWAN,M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19670903 199303 2 008